

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ahmad Muhtadi Ranguti, et.al, 2017. Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Depok: Pusat Studi Hukum FH UII
- Boer Mauna, 2005. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT. Alumni Bandung
- Chairul Anwar, 1989 *Hukum Internasional "Horizon Baru Hukum Laut Internasional"*, Jakarta: Djambatan
- Dedy Koespramudya, 2003, *Strategi Dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Bappenas
- Deddy Muhibah, 2012. Optimalisasi Pembangunan Wilayah Perbatasan Guna Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Dino Patti Djalal, 1996. *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, Jakarta: CSIS
- Eki Darmawan, Mahadiansar, 2021, and Oksep Adhayanto, *Dinamika Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Laut Di Indonesia*. Tanjungpinang: Lab. Komsos Fisip UMRAH
- Hans Kelsen, 2006. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: PT. Nusamedia Nuansa
- Madu Ludiro, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press
- Mochtar Kusumaatmadja. 1996, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta

Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Priyatna Abdurrasyid, *Prinsip-prinsip Hukum Angkasa*, 2002. Jakarta: PT Sinar Grafika Offse

Rusmiyanti; et al., 2022, *Manajemen Perbatasan*, Bandung: Cendekia Press

Sudargo Gautama, 2006. *Landas Kontinen di Indonesia*, Bandung: Alumni Bandung

Tedjo Edhy Purdijanto, 2010. *Mengawal Perbatasan Negara Maritim* Jakarta: Grasindo.

Wahyu Sasongko, 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas lampung

Winsulangi Salindeho dan Pitres Sombowadilr, 2008. *Daerah Perbatasan Keterbatasan Perbatasan*, Yogyakarta: FUSPAD

Wuryandari Ganewati, 2009, *Keamanan Di Perbatasan Indonesia – Timor Leste, Sumber Ancaman Dan Kebijakan Pengelolaannya*, Yogyakarta: P2P-LIPI & Pustaka Pelajar

Jurnal/Skripsi

Boy Anugerah. 2021. *Pembinaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terdepan Di Indonesia Dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Nasional*. *JURNAL Kebijakan Pembangunan* Vol. 16 No. 2.

Chehafni Damanik, et.al. 2023 *Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim*. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No. 1.

Deddy Theohery, 2018 *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional.*, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* Vol 2 (1)

Dewa Gede Sudika Mangku. 2018. *Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Vol 4, No 2.

- Dhesy A. Kase. 2020. Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Proyuris* Vol. 2 No. 1
- Eko Handrian, Hendry Andry, and Azmi, 2020, “Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti,” *Jurnal Kemunting* 1, no. 2
- Engelbertus Tobu, Yohanes Arman, and Kathrine Maharani Mamengko, 2023 “Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dan Negara Timor Leste,” *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 5
- Hanita Margaretha, 2006, “Strategi Pertahanan Di Wilayah Perbatasan, Studi Di Tiga Wilayah Perbatasan : Papua, Timor, Dan Kalimantan,” *Jurnal Aplikasi Stratejik* 1, no. 1.
- Imas Sholihah, 2018 “Penegakan Hukum Terhadap Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia Untuk Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Lex Et Societatis* 4, no. 10
- Indah Nur Fitriani et.al., 2018 Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Administratif Indonesia, *Edu Geography*, Vol 6 (1)
- Indriati Modeong. Flora Pricilla Kalalo, Fernando J. M. M. Karisoh. 2020 Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia. *Jurnal Lex Privatum* Vol. 8 No. 3.
- Jeanne Darc Noviyanti Manik. 2018. Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara. *Jurnal Hukum Progresif*: Volume 12 No.1.
- Muhammad Ahalla Tsauro, 2017. “Makna Deklarasi Djuanda Dan Konferensi PBB Tentanh Hukum Laut Untuk Indonesia,” *Jurnal Echoes Of Justice* 4, no. 1
- Mohamad Naufal Izul Fahlevi. 2018 “Perlindungan Hukum Tehadap Pulau Pulau Terluar Di Indonesia.”. *Skripsi*. Semarang:Fakultas Hukum, Universitas Semarang

- Oksep Adhayanto et al., 2023, “Pengelolaan Perbatasan Negara: Perbandingan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau” (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
- Oksep Adhayanto et al., 2023. “Implementation of Border Management Authority in Karimun Regency,” *Journal La Sociale* 04, no. 05
- Pertiwi Talumantak, 2018“Penegakan Hukum Terhadap Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia Untuk Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Lex Et Societatis* 4, no. 1
- Popi Talia Munata. 2023 “Analisis Hukum Peran Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Penentuan Batas Maritim Internasional .”. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.
- Rivanlee Anandar dan Bambang Shergi Laksmono., 2020 Perubahan Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP3K) Serta Dampaknya Pada Kelompok Nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu., *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol 2 (1)
- Raymond W. Sollitan, 2019, Daisy Posumah, and Franky R. D. Rengkung, “Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia-Singapura (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipa),” *Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4
- Sri Rahayu and Johan Jeques Junior, 2021, “Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau),” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 9, no. 2
- Viviyane O. Manukang. 2016. Kajian Hukum Wilayah Perbatasan Dalam Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4. No. 3
- Winanda Kusuma, A. Cery Kurnia, 2022. Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional, *jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vo. 4. No. 3,
- Yahya Ahmad Zein. 2016. Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. *jurnal HukumIus Quia Iustum* Vol 23. No. 1.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor: 1 Tahun 2011, tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2011-2025

Internet

Ahmad zazali. "Tambang Pasir Laut dan reklamasi Daratan Singapura" *Betahita.Com*. Last modified 2023. Accessed 4 Desember, 2022. <https://betahita.id/news/detail/8884/tambang-pasir-laut-dan-reklamasi-daratan-singapura>